**KPM 321 – Kajian Agraria**

**REFORMA AGRARIA DI KANCAH DUNIA**

**Pengalaman Reforma Agraria negara Post-Kolonial**

PEMBAHASAN

1. Trend kebijakan Agraria Negara Post-Kolonial
2. Dominasi sistim ekonomi global Neo-Liberal dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan Agraria di Negara Sedang Berkembang
3. TREND KEBIJAKAN AGRARIA NEGARA POST-KOLONIAL

**Pendahuluan**

Kebijakan ekonomi dari negara-negara yang baru melepaskan diri dari Kolonialisme pasca Perang Dunia II pada umumnya difokuskan pada perombakan struktur ekonomi kolonial dan mengejar ketertinggalannya didalam kesejahteraan. Karena itu istilah Negara Sedang Berkembang/Developing Countries sering digunakan untuk mencirikan negara-negara yang baru merdeka dari kolonialisme ini. Pihak-pihak yang memandang dan menerangkan permasalahan negara-negara baru pasca kolonial ini dengan lebih kritis, menggunakan beragam istilah lain, seperti “*underdeveloped countries*” atau “*third world countries*”/negara Dunia ke III, atau istilah “negara *Post-colonial*” dan yang kini menjadi populer adalah istilah “negara-negara Selatan”. Istilah-istilah belakangan ini, memandang kemiskinan dan keterbelakangan dari negara-negara baru ini sebagai akibat dari keterhubungannya dengan negara-negara industri kapitalis (yang disebut juga dengan istilah “developed countries”, “First world”, “negara-negara kaya” atau “negara-negara Utara”), sebagai koloni maupun setelah itu didalam hubungan ekonomi yang tidak seimbang dan exploitatif. Setiap istilah memiliki kekuatan dan kelemahannya atau keterbatasannya sendiri. Di dalam perkuliahan ini digunakan istilah “negara post-kolonial” (ada juga yang menggunakan istilah posta-kolonial), untuk menekankan ciri khas dari negara-negara baru ini yaitu, setelah kemerdekaan tetap berada dibawah dominasi negara-negara industri kapitalis.

Di kebanyakan negara post-kolonial, peranan kelembagaan-kelembagaan negara dan pemerintah dihampir semua aspek kehidupan sangat dominan. Masa kolonialisme yang panjang telah mencegah tumbuhnya kategori-kategori sosial (misalnya kelas menengah yang mandiri) di dalam masyarakat terjajah yang dapat menjadi motor perkembangan ekonomi nasional. Negara mengambil alih peranan tersebut. Selain itu kebutuhan bangsa yang baru merdeka itu untuk merombak kelembagaan sosial, ekonomi, politik dan budaya ex-kolonial di dalam rangka membangun suatu bangsa merdeka yang sejahtera, dipercayakan pada negara yang bertindak sebagai representasi bangsa tersebut. Peran sentral dari negara seringkali berlanjud dan mengambil bentuk otoritarian, karena kedudukan sentral tersebut menumbuhkan konsentrasi kekuasaan yang membawa penyelewengan kekuasaan dan penumpukan kepentingan dikalangan birokrasi dan pejabat pemerintah beserta lingkaran kecil pemodal besar. Konteks politik-ekonomi ini menentukan dinamika kebijakan agraria dari negara-negara Post-Kolonial, tidak terkecuali Indonesia.

*Perhaps no other policy issue is more* susceptible to shifts in ideology and the balance of political power *than the transfer of land property rights. The controversy seems to arise from changing the roles of the state and the market in this transfer and, in turn, the distribution of income and opportunities for progress* (M. Riad El-Ghonemy, 2001: 103)

**Dekade Emas bagi Petani Miskin (1940 – 1970an)**

Periode usainya Perang Dunia II sampai dengan akhir tahun 1970an dikenal sebagai dekade emas bagi petani miskin, karena kebanyakan negara-negara Post-Kolonial menerapkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut pertanahan/agraria yang memihak pada petani miskin. Dua faktor melatari kecendrungan kebijakan agraria ini: 1) Kondisi politik di negara-negara Post-Kolonial ini yang kondusif bagi kebijakan agraria yang memihak petani miskin. Negara-negara post-kolonial ini baru keluar dari proses dekolonisasi, dengan semangat nasionalisme tinggi dan keinginan kuat untuk membebaskan petani – yang merupakan bagian terbesar dari penduduk dan sekaligus paling intensif diexploitasi kolonialisme – dari belenggu kemiskinan. Selain itu 2) Pada tingkat global, perang dingin antara blok Barat dan Blok Timur membawa konsekwensi bahwa blok Barat berkepentingan untuk mendukung kebijakan-kebijakan pro petani miskin di negara-negara baru Post-kolonial untuk mencegah masuknya pengaruh ideologi sosialis dari Blok Timur. Amerika Serikat dan lembaga internasional seperti FAO –UN (Food & Agriculture Organization of UN) mendukung program-program Land Reform di negara-negara Post-kolonial dengan dana dan tenaga ahli.

Beberapa slides dibawah ini memperlihatkan kebijakan-kebijakan Land Reform yang diterapkan oleh negara-negara Post-Kolonial, segera setelah merdeka. Selain dari berbagai bentuk kebijakan yang menyangkut hak penguasaan dan pemilikan atas tanah, terdapat juga







Pada tabel-tabel diatas dapat dilihat posisi Indonesia diantara negara-negara lain di Asia dan Timur-Tengah dalam hal penerapan Land Reform atau Reforma Agraria. Indonesia melansir kebijakan Land Reform setelah mensahkan UU No.5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA no.5/1960) dan UU No.2 tahun 1969 Tentang Perjanjian Bagi-Hasil. Tabel dibawah ini memperlihatkan capaian dari kebijakan Land Reform dari negara-negara Post-colonial, di dalam hal prosentase Rumah Tangga petani yang menerima tanah dari program Land Reform, dan prosentase dari total luas tanah pertanian yang diredistribusi pada petani miskin.



Dari awal, kebijakan land reform di Indonesia terus mengalami tentangan pada tingkat nasional maupun lokal, hal mana mengakibatkan kebijakan nasional ini tidak di dukung sepenuhnya oleh semua aparat pemerintah sehingga tidak berjalan dengan semestinya. Konsekwensi dari kebijakan setengah hati ini terlihat pada ada tabel terakhir, Performa Land Reform, dalam hal luasan tanah pertanian yang diredistribusikan pada petani miskin, dan jumlah rumah-tangga petani miskin penerima tanah dari program Land Reform posisi Indonesia termasuk paling rendah diantara negara-negara baru yang lain. Selain itu, pelaksanaan program Land Reform di Indonesia berlangsung pendek. Hanya 5 tahun setelah UUPA no.5/1960 terbit dan Land Reform dilaksanakan, pemerintahan Sukarno jatuh dan digantikan Orde Baru dibawah Jendral Suharto yang merubah orientasi politik dan sistim ekonomi Indonesia secara radikal. Dibawah Orde Baru, Indonesia menjadi ladang investasi modal asing dan Land Reform tidak mendapat dukungan lagi.

1. GLOBALISASI EKONOMI NEO-LIBERAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEBIJAKAN AGRARIA DI NEGARA POST-KOLONIAL

Dua perkembangan penting pada belahan kedua tahun 1970an berpengaruh penting terhadap kebijakan agraria negara-negara Post-Kolonial. Perkembangan yang pertama adalah, runtuhnya negara-negara Blok Timur (Sovjet dengan negara-negara satelitnya di Eropah) maka perang dingin mencair dan negara-negara blok Barat (terutama Amerika Serikat) menjadi kekuatan dominan di dunia. Di dalam kondisi geopolitik seperti ini negara-negara Blok Barat, terutama AS, tidak memiliki kepentingan lagi untuk mendukung



pendanaan dan legitimasi bagi kebijakan populis di negara-negaraa miskin Post-kolonial – misalnya Land Reform - dalam rangka membendung pengaruh sosialis dari Blok Timur. Perkembangan kedua adalah, tumbuhnya pengaruh dari pendekatan Neo-Liberal menggantikan pendekatan Keynesian di dalam sistim ekonomi nasional dan global. Perkembangan pada tingkat global ini membawa dampak ikutan berupa: 1) pudarnya kebijakan Pembaruan Agraria sebagai salah satu poros penting didalam konsep pembangunan negara Post-kolonial; dan 2) pudarnya dukungan negara-negara blok Barat (negara industri kapitalis) pada kebijakan Pembaruan Agraria di negara-negara Post-koloial.

**Dari “Embedded Liberalism” ke “Neo-Liberalism”** (David Harvey. 2005) 

Pasca Perang Dunia ke II terbentuk suatu kesepakatan diantara negara-negara Barat untuk mengatur perpolitikan dan ekonomi dunia agar bencana PD I dan PD II tidak terulang, yaitu : menjamin agar tidak terjadi jurang besar antara modal/capital dengan kaum pekerja dan persaingan antar negara yang demikian menajam sehingga dapat mengancam perdamaian dunia. Pada dasarnya adalah Penerapan pendekatan **Keynesian** pada tata kelola perekonomian, yang kemudian disebut sebagai “Embedded Liberalism” (10-11).

Pendekatan Keynesian di dalam konteks bangsa: Peranan negara harus diperkuat dalam menjaga agar sistim ekonomi pasar tidak kebablasan. Sistim-sistim pengendalaian di kembangkan post PD II oleh pemerintah2 Sosial-Demokrat maupun Kristen-Demokrat. Semboyan2*: full employment*, *economic growth, welfare of the citizens*. Negara Kalau perlu dengan intervensi kuat di dalam mekanisme pasar, menguasai sektor-sektor kunci seperti komunikasi, transportasi, energi, memaksakan kompromi antara modal dan pekerja. – MENJAMIN KEDAMAIAN DAN KETENANGAN DOMESTIK.

Dalam kontek Dunia: Perdagangan bebas diletakkan dibawah suatu kerangka moneter yang dikendalikan, dengan nilai tukar mata uang berdasarkan nilai dollar yang ditetapkan sesuai dengan nilai emas. Kelembagaan-kelembagaan internasional harus mendapat peran yang kuat: World Bank, IMF, United Nation. Suatu orde Dunia Baru/New World Order direkayasa didalam Bretton Woods agreement.

Krisis tahun 1970an & Kebangkitan Neo-Liberalisme: terutama sangat merugikan bagi *the upper elite of the developed nations*. Pilihan untuk meyelesaikan krisis ekonomi ini menajam pada dua pilihan solusi: (1. Memperdalam peranan negara di dalam mengatur masyarakat. (2. Liberalisasi ekonomi dengan menyingkirkan pendekatan Keynesian /“embedded Liberalism”.

Pilihan yang kedua ternyata yang keluar sebagai pemenang, sesuai dengan perkembangan lain seperti naik panggungnya Reagan dan Thatcher - tokoh kanan dan liberal - masing-masing sebagai presiden AS dan perdana menteri Inggris. Sesuai pula dengan usainya perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur.

*Neoliberalism is in the first instance a theory of poitical economic practices that proposes that human well-being can best be advanced by liberating individual entrepreneurial freedoms and skills within an institutional framework characterized by strong private property rights, free markets, and free trade* (David Harvey. 2005: 2)

Landasan pandangan ekonomi Neo-Liberal (Mansour Fakih, 2002) 

* Kebijakan ‘pasar bebas’ menjamin alokasi sumberdaya yang paling efisien.
* Kebijakan ‘pasar bebas’ menyeimbangkan usaha swasta dan *consumers choice*.
* Penghargaan atas tanggung jawab personal dan ke-wiraswastaan
* Menyingkirkan birokrasi dan parasit pemerintah

Dalam kebijakan konkrit:

* Bebaskan perusahaan swasta dari campur tangan pemerintah (dalam urusan tenaga-kerja, investasi, harga, dsb)
* Hentikan subsidi negara kepada rakyat
* Privatisasi perusahaan milik negara (dan Sumberdaya Agraaria)
* Menghapus idelogi ‘kesejahtraan bersama’ dan kepemilikan komunal/tradisional karena menghalangi pertumbuhan dan manajemen efisien dari sumberdaya.

Di dalam kondisi global seperti ini maka tidak ada lagi dukungan bagi kebijakan populis seperti Pembaruan Agraria/Land Reform, baik dari negara-negara industri Barat (misalnya dalam bentuk pendanaan dan tenaga ahli) dan dari pemerintah di negara-negara Post-Kolonial.

Indonesia dapat dijadikan contoh. Hanya dalam waktu 5 tahun, setelah pemerintahan Sukarno jatuh tahun 1965 dan digantikan oleh Suharto/Orde Baru, orientasi sistim ekonomi Indonesia berubah radikal menjadi liberal, membuka pintu selebarnya untuk modal asing. Sesuai dengan itu, orientasi politik Indonesia berubah, dari penggalang solidaritas antara negara-negara miskin Asia, Afrika dan Amerika Latin, menjadi berorientasi pada negara-negara Industri kapitalis. Dalam rangka orientasi ekonomi dan politik baru ini, program Land Reform dihentikan dan kelembagaan yang berkaitan dengan Land Reform, seperti Pengadilan Land Reform dihapuskan. Sejalan dengan pemburuan terhadap semua organisasi dan pihak yang dinyatakan beraliran kiri oleh Orde Baru, maka organisasi-organisasi tani yang aktif mendorong mendorong pelaksanaan Land Reform dibubarkan pemerintah. Selanjutnya dalam rangka de-politisasi masyarakat pedesaan, pemerintah menerapkan kebijakan “Politik Massa Mengambang”, yang intinnya melarang kegiatan politik pada tingkat desa (lihat selanjudnya bab IVa Struktur Agraria Post-Kolonial).

SUMBER BACAAN

Fakih, Mansur (2001), *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Pustaka Pelajar, INSIST Press.

Ghonemy, (2001), di dalam Krishna B. Ghimire (ed.) (2001*), Land Reform & Peasant Livelihoods. The Social Dynamics of Rural Poverty & Agrarian Reform in Developing Countries*. ITDG Publishing, London, UK.

Harvey, D (2005), *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford University Press.

----------------- \*\*\*\* ----------------